PARTISIPASI TOKOH ADAT DAN TOKOH AGAMA DALAM MENDUKUNG PENINGKATAN AKSES PENDIDIKAN BAGI ANAK USIA SEKOLAH DI KABUPATEN MAPPI PROVINSI PAPUA SELATAN

Alberthina Yaho Regoy
NPP. 33.1078
Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah
Email: albertinaregoy03@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Ismail S.Pdi,M.Si
Email: ismail@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement (Kesenjangan Penelitian/Research Gap): *Mappi Regency faces complex challenges as a 3T area (Frontier, Outermost, and Disadvantaged), ranging from geographical constraints such as swamps and dense forests to socio-cultural barriers like hunting traditions that are often prioritized over formal education.* ***Purpose:*** *This research aims to describe and analyze the participation of traditional and religious leaders in supporting the improvement of educational access for school-aged children in Mappi Regency, South Papua Province.* ***Method:*** *This study employs a qualitative approach with data collection methods including observation, semi-structured interviews, and documentation. Informants in this study include the Head of the Education Office, traditional leaders from the Traditional Community Institution (LMA), religious leaders (Christian, Catholic, Muslim), and community representatives.* ***Result:*** *The results show that the participation of traditional and religious leaders has been implemented in the dimensions of decision-making, implementation, and benefit utilization, although it is not yet fully optimal. The evaluation dimension was found to be the weakest aspect due to the absence of a systematic formal platform. The main obstacles faced include difficult geographical conditions, cultural values contradictory to the formal school system, and limited operational resources. Efforts made include strengthening informal coordination, local wisdom-based socialization approaches, and utilizing religious forums as educational media regarding the importance of education.* ***Conclusion:*** *Traditional and religious leaders play a significant role in improving educational access in Mappi Regency, although geographical, cultural, and resource limitations still require stronger coordination and evaluation mechanisms.*
Keywords: *Participation, Traditional Leaders, Religious Leaders, Educational Access, Mappi Regency.*

ABSTRAK

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian/Research Gap): Kabupaten Mappi menghadapi tantangan kompleks sebagai daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal), mulai dari kendala geografis berupa rawa dan hutan lebat, hingga hambatan sosial budaya seperti tradisi berburu yang seringkali lebih diprioritaskan daripada pendidikan formal. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis partisipasi tokoh adat dan tokoh agama dalam mendukung peningkatan akses pendidikan bagi anak usia sekolah di Kabupaten Mappi, Provinsi Papua Selatan. **Metode**: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini meliputi Kepala Dinas Pendidikan, tokoh adat dari Lembaga Masyarakat Adat (LMA), tokoh agama (Kristen, Katolik, Islam), serta

perwakilan masyarakat. **Hasil/Temuan**: Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi tokoh adat dan tokoh agama telah berjalan pada dimensi pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan pemanfaatan hasil, meskipun belum optimal secara menyeluruh. Dimensi evaluasi ditemukan sebagai aspek yang paling lemah karena belum adanya wadah formal yang sistematis. Hambatan utama yang dihadapi meliputi kondisi geografis yang sulit, nilai budaya yang kontradiktif dengan sistem sekolah formal, serta keterbatasan sumber daya operasional. Upaya yang dilakukan mencakup penguatan koordinasi informal, pendekatan sosialisasi berbasis kearifan lokal, dan pemanfaatan forum keagamaan sebagai media edukasi mengenai pentingnya pendidikan. **Kesimpulan**: Partisipasi tokoh adat dan tokoh agama berperan penting dalam meningkatkan akses pendidikan di Kabupaten Mappi, meskipun masih menghadapi hambatan geografis, budaya, dan keterbatasan sumber daya yang memerlukan penguatan koordinasi dan evaluasi.
Kata kunci: Partisipasi, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Akses Pendidikan, Kabupaten Mappi.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pendidikan merupakan fondasi utama bagi kemajuan bangsa dan hak setiap warga negara yang dijamin konstitusi, sejalan dengan SDG 4 tentang pendidikan berkualitas yang menekankan pendidikan inklusif, merata, dan kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua (Pascasarjana & Hasanuddin, 2015). Pembangunan nasional bertujuan memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga masyarakat harus ditempatkan sebagai subjek sekaligus objek pembangunan. Perubahan yang direncanakan tetap diperlukan karena perubahan alamiah belum mampu mewujudkan visi pembangunan secara otomatis (Salman, 2009). Selain itu, keberhasilan pendidikan tidak hanya bergantung pada sekolah, tetapi juga pada kemitraan yang kuat antara sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam mendukung proses belajar peserta didik (Epstein, 2018).

Pendidikan merupakan hak mendasar setiap anak dan kunci memutus rantai kemiskinan. Namun, akses pendidikan di Kabupaten Mappi masih menghadapi hambatan geografis, sosial, dan ekonomi. Sebagai daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal), Mappi memiliki keterbatasan infrastruktur pendidikan sehingga pendidikan menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (Azka Salmaa Salsabilah et al., 2021). Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan rumah tangga dan keterbatasan kondisi wilayah berpengaruh signifikan terhadap partisipasi anak dalam pendidikan dasar (Huisman & Smits, 2009).

Peningkatan pendidikan di daerah 3T didukung oleh UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Perpres Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal. Kebijakan yang dilakukan meliputi pembangunan infrastruktur pendidikan, program beasiswa, penyediaan transportasi, dan peningkatan kompetensi guru. Dalam konteks negara berkembang, perluasan akses pendidikan memerlukan intervensi yang tidak hanya berfokus pada penyediaan layanan sekolah, tetapi juga pada pengurangan hambatan sosial, ekonomi, dan geografis yang dihadapi masyarakat (Lewin, 2009).

Secara geografis, Kabupaten Mappi memiliki wilayah luas dengan medan rawa dan hutan lebat yang menyulitkan pembangunan sekolah dan distribusi tenaga pendidik. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang sebagian besar bergantung pada pertanian dan perikanan juga menyebabkan anak-anak sering membantu orang tua bekerja sehingga meningkatkan risiko putus sekolah dan rendahnya partisipasi pendidikan. Selain itu, faktor budaya dan tradisi, seperti kewajiban anak laki-laki berburu atau anak perempuan menjalankan peran domestik, serta penggunaan bahasa pengantar yang bukan

bahasa ibu, turut menjadi hambatan pendidikan. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa kemiskinan dan praktik budaya tertentu dapat memperkuat ketimpangan akses pendidikan, terutama pada kelompok yang rentan (Colclough, Rose, & Tembon, 2000).

Permasalahan utama pembangunan pendidikan di Mappi adalah belum optimalnya ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan, dan kepastian layanan pendidikan. Kondisi ini tercermin dari rendahnya tingkat pendidikan penduduk usia kerja yang masih didominasi lulusan SD, rendahnya APK dan rata-rata lama sekolah, serta belum berkembangnya pendidikan nonformal sebagai alternatif pendidikan formal. Di berbagai negara berkembang, rendahnya akses pendidikan sering kali berkaitan dengan ketidakmerataan layanan pendidikan dan lemahnya dukungan sosial bagi kelompok masyarakat marginal (Lewin, 2009).

Data Dinas Pendidikan Kabupaten Mappi Tahun 2024 menunjukkan beberapa indikator masih berada di bawah target, terutama APK PAUD yang hanya mencapai 24,48% dan APK SD sebesar 75,28%. Selain itu, angka putus sekolah, tingkat melek huruf penduduk usia di atas 15 tahun, dan proporsi guru PAUD berkualifikasi S1/D4 juga belum mencapai target. Dari 16 sasaran strategis, terdapat 6 sasaran yang melampaui target, 5 sesuai target, dan 5 belum mencapai target (Laporan Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Mappi, 2024).

Belum optimalnya pelayanan pendidikan disebabkan oleh belum meratanya layanan pendidikan, rendahnya kualitas dan kuantitas tenaga pengajar, rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendorong anak bersekolah, serta rendahnya kualitas manajemen pelayanan pendidikan (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Mappi, 2024). Kondisi ini diperparah oleh lemahnya kapasitas kelembagaan, keterbatasan sarana prasarana, rendahnya kompetensi aparatur, serta tingginya residu data peserta didik yang meliputi NISN, data kependudukan, dan kode wilayah (Kemendikdasmen, 2023).

Mengingat kompleksitas permasalahan tersebut, partisipasi tokoh adat dan tokoh agama menjadi sangat penting. Tokoh adat berperan sebagai penjaga nilai, hukum, dan kearifan lokal yang dapat menjembatani hubungan sekolah dengan masyarakat serta mendorong orang tua menyekolahkan anak. Sementara itu, tokoh agama dapat memanfaatkan kegiatan keagamaan untuk menyebarkan pentingnya pendidikan dan mengembangkan program pendidikan berbasis komunitas. Meskipun belum ada regulasi khusus di Kabupaten Mappi, UU Nomor 20 Tahun 2003 dan kebijakan Otonomi Khusus Papua menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat, termasuk tokoh adat dan tokoh agama, dalam mendukung peningkatan akses pendidikan. Keterlibatan keluarga, komunitas, dan pemimpin masyarakat terbukti mampu meningkatkan dukungan terhadap pendidikan serta memperkuat keberlanjutan partisipasi anak di sekolah (Epstein, 2018). Selain itu, strategi yang melibatkan tokoh masyarakat dan perubahan norma sosial dinilai efektif dalam mengatasi hambatan budaya yang menyebabkan anak tidak melanjutkan pendidikan (Tuwor & Sossou, 2008).

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (Research Gap)

Penelitian ini berfokus pada permasalahan masih rendahnya akses dan partisipasi pendidikan bagi anak usia sekolah di Kabupaten Mappi, Provinsi Papua Selatan. Kabupaten Mappi sebagai daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) menghadapi berbagai hambatan dalam penyelenggaraan pendidikan, mulai dari kondisi geografis yang sulit dijangkau, keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan, rendahnya kualitas dan kuantitas tenaga pendidik, hingga rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendorong anak untuk bersekolah. Data Dinas Pendidikan Kabupaten Mappi Tahun 2024 menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD hanya mencapai 24,48% dari target 100%

dan APK SD sebesar 75,28% dari target 100%, yang mengindikasikan masih rendahnya keterjangkauan pendidikan bagi anak usia sekolah. Selain itu, budaya lokal yang masih menempatkan aktivitas berburu, meramu, dan peran domestik sebagai prioritas bagi anak-anak juga menjadi faktor yang memengaruhi rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan formal.

Meskipun berbagai penelitian terdahulu telah membahas permasalahan akses dan mutu pendidikan di Papua, seperti optimalisasi pendidikan di daerah 3T, pemanfaatan pembelajaran daring untuk memperluas akses pendidikan, serta strategi peningkatan mutu pendidikan di wilayah pegunungan Papua, penelitian-penelitian tersebut lebih banyak berfokus pada aspek kebijakan, infrastruktur, teknologi pembelajaran, dan strategi pemerintah dalam meningkatkan layanan pendidikan. Masih terdapat keterbatasan penelitian yang secara khusus mengkaji bagaimana partisipasi tokoh adat dan tokoh agama sebagai aktor sosial yang memiliki pengaruh kuat dalam masyarakat adat Papua berkontribusi dalam mendukung peningkatan akses pendidikan bagi anak usia sekolah, khususnya di Kabupaten Mappi. Selain itu, belum banyak penelitian yang menganalisis bentuk partisipasi, hambatan yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan oleh tokoh adat dan tokoh agama dalam menjembatani nilai budaya lokal dengan kebutuhan pendidikan formal. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis partisipasi tokoh adat dan tokoh agama dalam mendukung peningkatan akses pendidikan bagi anak usia sekolah di Kabupaten Mappi.

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan karena akses pendidikan bagi anak usia sekolah di Kabupaten Mappi masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya angka partisipasi pendidikan pada beberapa jenjang, tingginya angka putus sekolah, keterbatasan sarana pendidikan, kondisi geografis yang sulit dijangkau, serta kuatnya pengaruh nilai budaya dan tradisi yang sering kali lebih diprioritaskan dibandingkan pendidikan formal. Di tengah kondisi tersebut, tokoh adat dan tokoh agama memiliki posisi strategis sebagai figur yang dihormati dan berpengaruh dalam membentuk pola pikir serta perilaku masyarakat, sehingga keterlibatan mereka menjadi faktor penting dalam mendorong kesadaran orang tua dan anak terhadap pentingnya pendidikan. Penelitian ini diperlukan untuk memberikan gambaran empiris mengenai bentuk partisipasi, hambatan, dan upaya yang dilakukan tokoh adat dan tokoh agama dalam mendukung peningkatan akses pendidikan sebagai dasar bagi Pemerintah Kabupaten Mappi dan pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang lebih adaptif terhadap kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Apabila penelitian ini tidak dilakukan, maka pemerintah akan mengalami keterbatasan informasi mengenai efektivitas peran tokoh adat dan tokoh agama dalam mendukung pendidikan, sehingga kebijakan yang disusun berpotensi kurang tepat sasaran, tidak mampu menjawab hambatan sosial budaya yang ada, dan berdampak pada lambatnya peningkatan akses pendidikan serta kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Mappi.

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini didukung oleh beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan peningkatan akses pendidikan di wilayah Papua, khususnya pada daerah dengan karakteristik geografis dan sosial budaya yang kompleks. Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan adanya berbagai pendekatan yang digunakan dalam mengatasi permasalahan pendidikan, mulai dari peningkatan mutu pendidikan, pemanfaatan teknologi pembelajaran, hingga strategi kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat. Selain itu, kajian mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan juga menunjukkan bahwa keterlibatan aktor-aktor lokal memiliki pengaruh penting dalam keberhasilan program

pembangunan. Mulyana dan Tambunan (2021) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat merupakan faktor strategis dalam mendukung proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan publik, sedangkan Rosshad (2019) menegaskan bahwa pembangunan partisipatif akan berjalan efektif apabila terdapat kesesuaian antara kebutuhan masyarakat dengan program yang direncanakan pemerintah.

Penelitian yang dilakukan oleh Faruqi Tutukansa dan Dwi Tuffahati (2022) berjudul Optimalisasi Peningkatan Kualitas Mutu Pendidikan Provinsi Papua sebagai Daerah 3T di Indonesia menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini berfokus pada permasalahan mutu pendidikan di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) di Provinsi Papua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya kualitas pendidikan dipengaruhi oleh keterbatasan tenaga pendidik, sarana dan prasarana pendidikan yang belum memadai, serta kondisi geografis yang sulit dijangkau. Penelitian ini merekomendasikan berbagai kebijakan untuk mengoptimalkan mutu pendidikan di Papua. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Mahadiansar (2021) yang menyatakan bahwa keberhasilan pembangunan sosial sangat dipengaruhi oleh strategi partisipatif yang melibatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan, sehingga setiap program yang dilaksanakan harus mampu mengakomodasi kebutuhan dan karakteristik lokal masyarakat setempat.

Selanjutnya, penelitian Saerang dkk. (2023) yang berjudul Pembelajaran Daring Membuka Akses Pendidikan Anak Asli Papua menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini bertujuan mengkaji pemanfaatan pembelajaran daring sebagai alternatif dalam memperluas akses pendidikan bagi anak-anak asli Papua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran daring mampu membantu mengurangi kesenjangan akses pendidikan, terutama bagi peserta didik yang berada di wilayah terpencil. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan jaringan internet, minimnya perangkat digital, dan rendahnya literasi teknologi masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan akses pendidikan tidak hanya membutuhkan dukungan teknologi, tetapi juga keterlibatan aktif masyarakat dan pemimpin lokal dalam mendorong penerimaan serta keberlanjutan program pendidikan.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Mimin (2021) dengan judul Strategi Meningkatkan Akses dan Mutu Pendidikan di Kabupaten Pegunungan Bintang Provinsi Papua. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menganalisis berbagai strategi yang dilakukan dalam meningkatkan akses dan mutu pendidikan di daerah pegunungan Papua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan kompetensi guru, serta kerja sama antara pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan lembaga keagamaan menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Selain itu, penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan berbasis kearifan lokal dan partisipasi masyarakat untuk memastikan keberlanjutan program pendidikan di wilayah pegunungan Papua. Temuan ini diperkuat oleh penelitian Tranggano, Effendy, Lukman, dan Tahir (2020) yang menjelaskan bahwa pemberdayaan komunitas adat akan lebih efektif apabila melibatkan tokoh adat sebagai aktor utama dalam proses implementasi kebijakan, karena mereka memiliki legitimasi sosial yang kuat dalam memengaruhi perilaku masyarakat. Sejalan dengan itu, Sukmana dan Islamy (2019) juga menemukan bahwa keberhasilan pembangunan sangat dipengaruhi oleh sinergi antara pemimpin lokal dan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian dengan judul "Partisipasi Tokoh Adat dan Tokoh Agama dalam Mendukung Peningkatan Akses Pendidikan bagi Anak Usia Sekolah di Kabupaten Mappi Provinsi Papua Selatan" memiliki nilai keaslian ilmiah (*novelty*) yang kuat melalui pemetaan posisi yang tegas terhadap tiga penelitian terdahulu di tanah Papua.Pertama, berbeda dengan Penelitian A (Faruqi & Tuffahati, 2022) yang berfokus pada kebijakan makro regional dan prasarana fisik di tingkat provinsi, penelitian ini secara teoritis mengadopsi Teori Partisipasi Masyarakat dari Cohen dan Uphoff (1977) untuk membedah pengaruh nyata tokoh adat dan agama di tingkat lokal. Kedua, kontras dengan Penelitian B (Saerang et al., 2023) yang mengandalkan digitalisasi (pembelajaran daring), penelitian ini menekankan intervensi kultural berbasis kearifan lokal yang dinilai lebih relevan bagi wilayah Mappi yang didominasi rawa, hutan lebat, serta terkendala jaringan internet. Ketiga, jika Penelitian C (Mimin, 2021) menitikberatkan pada penguatan birokrasi pemerintah formal dan kompetensi guru di wilayah pegunungan, kajian ini justru menempatkan tokoh informal dari Lembaga Masyarakat Adat (LMA) dan tokoh agama sebagai subjek penggerak utama (*human instrument*). Legitimasi emosional-kultural kedua tokoh tersebut dioptimalkan untuk menjembatani benturan nilai antara tradisi lokal (seperti masa berburu) dengan sistem persekolahan formal.Melalui pemetaan ini, kemampuan penelitian dalam mengisi celah sistem evaluasi program yang belum terwadahi secara formal menjadi pembeda mutakhir yang memberikan sumbangsih strategis bagi perumusan kebijakan pendidikan otonomi khusus di daerah 3T.

1.6. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis partisipasi tokoh adat dan tokoh agama dalam mendukung peningkatan akses pendidikan bagi anak usia sekolah di Kabupaten Mappi, Provinsi Papua Selatan.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena sosial di lapangan, serta menggambarkan secara komprehensif bagaimana mekanisme, pola komunikasi, dan kontribusi nyata tokoh informal dalam mendukung akses pendidikan anak usia sekolah. Lokasi penelitian ditetapkan di Kabupaten Mappi, Provinsi Papua Selatan, dengan pertimbangan wilayah ini memiliki karakteristik topografi rawa dan hutan lebat yang khas, serta tantangan sosial-kultural yang tinggi terkait angka putus sekolah anak. Pengumpulan data primer dilakukan selama kurun waktu 3 (tiga) bulan, terhitung sejak bulan November 2025 hingga Januari 2026. Penentuan informan dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, di mana subjek yang dijadikan sumber data didasarkan pada kriteria tertentu yang dinilai paling memahami permasalahan akses pendidikan di wilayah tersebut. Informan kunci (*key informants*) dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mappi dan Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Mappi. Alasan pemilihan informan kunci tersebut adalah karena mereka memiliki legitimasi formal dan kultural tertinggi, memegang otoritas kebijakan, serta mempunyai pengetahuan mendalam mengenai sinkronisasi antara program pemerintah dan realitas adat masyarakat lokal. Adapun informan pendukung terdiri dari tokoh agama (Pastor, Pendeta, Ustaz), tokoh adat tingkat distrik/kampung, kepala sekolah, guru, serta orang tua murid yang dipilih karena terlibat langsung dalam interaksi harian masyarakat dan pelaksanaan pendidikan di lapangan.

Guna menjamin keabsahan dan keandalan data yang dikumpulkan, penelitian ini menerapkan teknik pengujian keabsahan data melalui Triangulasi Sumber dan Triangulasi Teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan informasi yang diperoleh dari tokoh adat, tokoh agama, serta pejabat Dinas Pendidikan. Sementara triangulasi teknik ditempuh dengan memverifikasi kesesuaian data yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi partisipatif di lapangan, dan studi dokumentasi berupa arsip atau laporan resmi. Selanjutnya, data yang telah dinyatakan valid dianalisis menggunakan model interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldana yang meliputi tiga tahapan simultan. Tahap pertama adalah reduksi data (*data reduction*), yaitu proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, dan transformasi data mentah dari lapangan agar relevan dengan dimensi partisipasi Cohen dan Uphoff. Tahap kedua adalah penyajian data (*data display*), di mana data yang telah direduksi diorganisasikan ke dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, atau matriks hubungan agar polanya mudah dipahami. Tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*), yaitu memaknai hubungan kausalitas di lapangan, mencari esensi dari partisipasi tokoh informal, dan merumuskan kesimpulan akhir yang kokoh sebagai temuan penelitian ilmiah.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan temuan penelitian yang diperoleh melalui wawancara mendalam. Analisis dilakukan berdasarkan empat dimensi partisipasi, yaitu: (1) partisipasi dalam pengambilan keputusan; (2) partisipasi dalam pelaksanaan; (3) partisipasi dalam pemanfaatan hasil; dan (4) partisipasi dalam evaluasi. Selain itu, penelitian ini juga menjawab rumusan masalah mengenai hambatan yang dihadapi serta upaya yang dilakukan oleh tokoh adat dan tokoh agama dalam mendukung peningkatan akses pendidikan bagi anak usia sekolah di Kabupaten Mappi.

3.1 Partisipasi Tokoh Adat dan Tokoh Agama dalam Mendukung Peningkatan Akses Pendidikan bagi Anak Usia Sekolah di Kabupaten Mappi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan akses pendidikan di Kabupaten Mappi tidak dapat bertumpu pada pemerintah daerah saja, melainkan membutuhkan keterlibatan tokoh adat (Lembaga Masyarakat Adat/LMA) dan tokoh agama (Pastor, Pendeta, Ustaz). Berdasarkan konsep kepemimpinan menurut Soerjono Soekanto (2012), kedua kelompok ini merupakan pemimpin informal (informal leaders) yang memiliki legitimasi kultural serta kepatuhan emosional yang kuat di masyarakat.

3.1.1 Partisipasi Tokoh Adat dan Tokoh Agama dalam Pengambilan Keputusan (Decision Making)

Dimensi pertama partisipasi menurut Cohen dan Uphoff adalah keterlibatan dalam tahap pengambilan keputusan. Dalam penelitian ini, dimensi tersebut merujuk pada sejauh mana tokoh adat dan tokoh agama dilibatkan dalam perumusan kebijakan, program, maupun rencana kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan akses pendidikan bagi anak usia sekolah di Kabupaten Mappi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mappi, pemerintah daerah telah mulai membuka ruang keterlibatan tokoh adat dan tokoh agama dalam forum musyawarah perencanaan pendidikan. Menurut beliau, kebijakan yang tidak melibatkan tokoh adat dan tokoh agama akan sulit diterima dan dijalankan di kampung-kampung.

Gambar 1.

Keputusan Bupati Mappi tentang Kelompok Kerja Budaya Sekolah Aman dan Nyaman di Kabupaten Mappi



BUPATI MAPPI
PROVINSI PAPUA SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI MAPPI
NOMOR :100.3.3.2/63/BUP/II/2026

TENTANG
KELOMPOK KERJA PENYELENGGARA BUDAYA SEKOLAH AMAN DAN NYAMAN KABUPATEN MAPPI PERIODE 2026-2030

BUPATI MAPPI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman, perlu menetapkan keputusan Bupati Mappi tentang Kelompok Kerja Penyelenggara Budaya Sekolah Aman dan Nyaman Kabupaten Mappi periode 2026-2030;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239); Undang-Undang Rebuplik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Berdasarkan Gambar 1. terlihat adanya dukungan pemerintah daerah melalui pembentukan Kelompok Kerja Budaya Sekolah Aman dan Nyaman Kabupaten Mappi yang melibatkan unsur masyarakat, termasuk tokoh adat dan tokoh agama dalam mendukung program pendidikan. Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Mappi menyatakan bahwa tokoh adat telah beberapa kali diundang dalam rapat terkait pendidikan dan memberikan masukan mengenai kondisi anak-anak di kampung serta hambatan mereka untuk bersekolah, meskipun belum semua saran ditindaklanjuti secara nyata.

Dari sisi tokoh agama, Pendeta GKI Kepi menyampaikan bahwa gereja sering diajak berdiskusi mengenai program pendidikan yang akan dijalankan di wilayah jemaat mereka. Sementara itu, Ketua MUI Kabupaten Mappi menjelaskan bahwa keterlibatan tokoh agama Islam masih bersifat insidental dan belum memiliki mekanisme formal yang baku. Masyarakat juga menilai bahwa kehadiran tokoh adat dan tokoh agama dalam pengambilan keputusan pendidikan sangat penting karena mereka merupakan figur yang dihormati dan dipercaya.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat dianalisis bahwa partisipasi tokoh adat dan tokoh agama dalam pengambilan keputusan sudah mulai terjalin, namun masih bersifat parsial dan belum sistematis. Keterlibatan mereka cenderung terjadi setelah adanya undangan resmi dari pemerintah, bukan melalui inisiatif aktif yang terlembaga. Kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme pelibatan tokoh adat dan tokoh agama dalam kebijakan pendidikan masih perlu diperkuat agar lebih berkelanjutan dan efektif.

3.1.2 Partisipasi Tokoh Adat dan Tokoh Agama dalam Pelaksanaan (Implementation)

Dimensi kedua partisipasi adalah keterlibatan dalam tahap pelaksanaan, yang mencakup kontribusi ide, tenaga, dan waktu dalam kegiatan nyata untuk meningkatkan akses pendidikan bagi anak usia sekolah di Kabupaten Mappi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tokoh adat dan tokoh agama memiliki kontribusi yang cukup signifikan. Kepala Sekolah SD Inpres Kepi menyampaikan bahwa pihak sekolah sangat terbantu oleh keberadaan tokoh adat dan pemuka agama, terutama ketika menghadapi orang tua yang enggan menyekolahkan anaknya. Tokoh adat sering menjadi mediator yang efektif antara sekolah dan keluarga.

Ketua LMA Kabupaten Mappi menjelaskan bahwa tokoh adat aktif mendorong orang tua untuk menyekolahkan anak dengan memberikan pemahaman bahwa pendidikan tidak bertentangan dengan adat, bahkan dapat membantu menjaga adat dengan lebih baik. Dari sisi tokoh agama, Pastor Paroki Katolik Rasul Paulus Kepi menyampaikan bahwa gereja terlibat dalam kegiatan belajar bersama dan pendampingan anak sebagai bagian dari tim penanganan anak yang membutuhkan perlindungan. Kegiatan ini membantu anak-anak mengerjakan tugas sekolah serta meningkatkan kemampuan membaca.

Pendeta GKI Kepi juga menyampaikan bahwa gereja secara rutin memberikan motivasi kepada jemaat melalui khotbah mengenai pentingnya pendidikan dan tanggung jawab orang tua dalam menyekolahkan anak. Sementara itu, Ketua MUI Kabupaten Mappi menjelaskan bahwa tokoh agama

Islam memanfaatkan forum pengajian dan ceramah untuk menanamkan pemahaman bahwa mencari ilmu merupakan kewajiban sehingga menyekolahkan anak merupakan bagian dari ibadah.

Masyarakat mengakui bahwa tokoh adat dan tokoh agama sering menjadi pihak pertama yang turun tangan ketika terdapat anak yang tidak bersekolah dengan memberikan motivasi dan pendekatan langsung kepada keluarga. Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dimensi pelaksanaan merupakan bentuk partisipasi yang paling nyata. Tokoh adat dan tokoh agama berkontribusi melalui sosialisasi, mediasi, motivasi, serta fasilitasi kegiatan belajar yang menunjukkan komitmen nyata dalam mendukung peningkatan akses pendidikan.

Tabel 1.

Bentuk Partisipasi Tokoh Adat dan Tokoh Agama dalam Pelaksanaan Peningkatan Akses Pendidikan Bagi Anak Usia Sekolah di Kabupaten Mappi Provinsi Papua Selatan

No.	Aktor	Bentuk Partisipasi	Keterangan
1	Tokoh Adat (LMA)	Mediasi orang tua agar menyekolahkan anak; sosialisasi pentingnya pendidikan di kampung	Langsung ke keluarga sasaran
2	Tokoh Agama Kristen (GKI)	Penyampaian pesan pendidikan melalui khotbah; motivasi jemaat	Setiap ibadah mingguan
3	Tokoh Agama Islam (MUI)	Ceramah kewajiban mencari ilmu dalam Islam; pengajian pendidikan	Forum pengajian rutin
4	Tokoh Agama Katolik (Paroki)	Bimbingan belajar di gereja; pendampingan anak kurang mampu	Setiap Sabtu di lingkungan paroki

Sumber: Hasil Wawancara, diolah oleh Peneliti, 2025.

Berdasarkan Tabel 1. bentuk partisipasi tokoh adat dan tokoh agama dalam pelaksanaan peningkatan akses pendidikan dilakukan melalui mediasi kepada orang tua, penyampaian pesan pendidikan melalui khotbah dan ceramah, kegiatan pengajian, bimbingan belajar, serta pendampingan anak. Kegiatan-kegiatan tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan mereka berlangsung secara langsung dan berkelanjutan di tengah masyarakat sehingga berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi anak usia sekolah.

3.1.3 Partisipasi Tokoh Adat dan Tokoh Agama dalam Pemanfaatan Hasil (Benefits)

Dimensi ketiga adalah partisipasi dalam pemanfaatan hasil, yang berkaitan dengan sejauh mana tokoh adat dan tokoh agama terlibat dalam memastikan bahwa anak usia sekolah benar-benar memperoleh dan menikmati manfaat dari program-program pendidikan yang telah dijalankan. Dimensi ini juga mencakup peran mereka dalam pemeliharaan dan keberlanjutan hasil program pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mappi menyatakan bahwa Dinas sangat mengharapkan peran aktif tokoh adat dan tokoh agama dalam memantau kehadiran serta keberlanjutan anak-anak bersekolah di wilayah masing-masing. Peran tersebut tidak berhenti saat anak masuk sekolah, tetapi juga memastikan anak tetap hadir dan semangat belajar.

Ketua LMA Kabupaten Mappi menyampaikan bahwa tokoh adat siap membantu masyarakat untuk memastikan anak-anak yang telah bersekolah tetap aktif hadir dan tidak putus sekolah. Selain mendorong anak masuk sekolah, tokoh adat juga memberikan nasihat kepada orang tua agar terus mendukung pendidikan anak-anak mereka. Dari sisi tokoh agama, Pastor Paroki Katolik melalui program pemerintah turut mendukung keberlanjutan pendidikan anak dengan memberikan bantuan moril dan kadang materiil kepada keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi, seperti bantuan perlengkapan sekolah agar faktor ekonomi tidak menjadi penghalang bagi anak untuk tetap bersekolah.

Perwakilan masyarakat menyatakan bahwa kehadiran tokoh adat dan tokoh agama yang terus mendampingi memberikan dampak psikologis positif bagi keluarga dan anak-anak. Perhatian yang diberikan membuat orang tua merasa diperhatikan dan lebih termotivasi untuk mendorong anak terus

bersekolah. Berdasarkan hasil penelitian, partisipasi tokoh adat dan tokoh agama dalam pemanfaatan hasil sudah mulai berkembang melalui pemantauan, pendampingan, dan dukungan kepada keluarga. Namun, keterlibatan tersebut masih perlu diperkuat karena belum merata di seluruh wilayah Kabupaten Mappi. Keterbatasan sumber daya dan luasnya wilayah menjadi faktor yang menghambat konsistensi partisipasi mereka.

3.1.4 Partisipasi Tokoh Adat dan Tokoh Agama dalam Evaluasi

Dimensi keempat adalah partisipasi dalam evaluasi, yaitu keterlibatan tokoh adat dan tokoh agama dalam pengawasan serta penilaian terhadap pelaksanaan dan hasil program peningkatan akses pendidikan di Kabupaten Mappi. Dimensi ini mencakup seberapa aktif mereka memberikan masukan untuk perbaikan program di masa mendatang. Berdasarkan hasil wawancara, dimensi evaluasi merupakan dimensi yang paling lemah dalam pola partisipasi yang ada saat ini. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mappi mengakui bahwa mekanisme formal untuk melibatkan tokoh adat dan tokoh agama dalam evaluasi program pendidikan belum terstruktur dengan baik. Evaluasi masih lebih banyak dilakukan secara internal, padahal masukan dari tokoh adat dan tokoh agama sangat penting karena mereka memahami kondisi masyarakat secara langsung.

Ketua LMA Kabupaten Mappi menyatakan bahwa tokoh adat sebenarnya memiliki banyak masukan mengenai program pendidikan, baik yang berhasil maupun yang belum tepat sasaran. Namun, belum tersedia wadah resmi yang memungkinkan mereka menyampaikan masukan tersebut secara terstruktur kepada Dinas Pendidikan. Pendeta GKI Kepi dan Pastor Paroki Katolik juga menyampaikan bahwa evaluasi yang mereka lakukan masih bersifat informal melalui pengamatan langsung dan laporan masyarakat. Informasi tersebut belum dapat disampaikan secara resmi karena tidak adanya forum evaluasi yang melibatkan mereka secara rutin.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa partisipasi tokoh adat dan tokoh agama dalam evaluasi program pendidikan masih sangat terbatas. Belum adanya mekanisme evaluasi yang terstruktur menyebabkan berbagai masukan dari masyarakat belum tersalurkan secara optimal. Kondisi ini menunjukkan perlunya pembentukan forum evaluasi yang melibatkan tokoh adat dan tokoh agama agar program pendidikan lebih responsif terhadap kebutuhan dan kondisi riil masyarakat di Kabupaten Mappi. Temuan ini sejalan dengan teori Cohen dan Uphoff yang menegaskan bahwa tanpa partisipasi dalam evaluasi yang terstruktur, kualitas program sulit meningkat secara berkelanjutan.

3.2 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pilar utama dalam mengukur kontribusi keilmuan (*scientific contribution*) dari penelitian ini terletak pada kemampuannya untuk mendiskusikan hasil temuan lapangan dengan khazanah penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Melalui analisis komparatif yang tajam, bagian ini membedah secara mendalam bagaimana temuan mengenai partisipasi tokoh adat dan tokoh agama di Kabupaten Mappi, Provinsi Papua Selatan, mengisi celah teoretis (*theoretical gap*) serta memperbarui kesimpulan-kesimpulan yang selama ini mendominasi literatur tata kelola pendidikan di tanah Papua.

Jika disandingkan dengan hasil temuan Penelitian A (*Faruqi Tutukansa & Dwi Tuffahati, 2022*) yang berfokus pada *"Optimalisasi Peningkatan Kualitas Mutu Pendidikan Provinsi Papua sebagai Daerah 3T di Indonesia"*, terdapat perbedaan mendasar dalam melihat akar masalah dan solusi pemecahan rendahnya akses pendidikan. Penelitian A menyimpulkan bahwa peningkatan akses pendidikan di Papua secara mutlak ditentukan oleh penguatan struktur makro, seperti standarisasi mutu nasional, peningkatan alokasi anggaran fungsi pendidikan, serta pemenuhan sarana-prasarana fisik persekolahan di bawah kendali pemerintah provinsi.

Sebaliknya, temuan empiris dalam penelitian ini menunjukkan bahwa intervensi makro-struktural tersebut menjadi tidak efektif di Kabupaten Mappi jika tidak dibarengi dengan pendekatan mikro-kultural. Temuan penelitian ini membuktikan bahwa faktor utama rendahnya partisipasi sekolah di Kabupaten Mappi bukan sekadar ketiadaan gedung sekolah, melainkan adanya ketidakselarasan nilai (*value mismatch*) antara kalender akademik sekolah formal dengan siklus kehidupan sosial-ekonomi masyarakat lokal. Sebagai contoh, tradisi berburu dan meramu yang mengharuskan keluarga memboyong anak-anak mereka ke dalam hutan rawa selama berbulan-bulan menjadi penyebab utama tingginya angka putus sekolah. Di sinilah kontribusi baru penelitian ini: ketika institusi formal mengalami jalan buntu, tokoh adat yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Adat (LMA) dan tokoh agama bertindak sebagai mediator kultural yang efektif. Melalui pendekatan personal dan legitimasi adat, mereka mampu mereduksi dampak negatif tradisi migrasi musiman tersebut terhadap kontinuitas belajar anak, sebuah dimensi lokalitas yang luput dari analisis makro Penelitian.

Analisis komparatif selanjutnya dilakukan terhadap Penelitian B (*Saerang et al., 2023*) yang mengkaji mengenai *"Pembelajaran Daring Membuka Akses Pendidikan Anak Asli Papua"*. Penelitian B menawarkan tesis bahwa digitalisasi pendidikan dan metode pembelajaran daring (*online learning*) merupakan instrumen paling akseleratif untuk menembus batas geografis dan mengatrol keterbatasan akses pendidikan bagi anak-anak asli Papua.

Namun demikian, temuan lapangan penelitian ini secara tegas mendekonstruksi klaim tekno-sentris tersebut apabila diimplementasikan pada wilayah dengan karakteristik khusus seperti Kabupaten Mappi. Penelitian ini menemukan bahwa penerapan teknologi digital menemui dinding tebal berupa *blank spot* jaringan internet yang masif, ketiadaan pasokan listrik yang stabil di distrik-distrik pedalaman, serta rendahnya literasi digital orang tua. Temuan penelitian ini memformulasikan argumen baru bahwa di tengah keterbatasan teknologi, instrumen terbaik untuk memperluas akses pendidikan bukanlah perangkat digital (*hardware/software*), melainkan modal sosial (*social capital*) dan instrumen manusia (*human instrument*) yang melekat pada ketokohan informal. Tokoh agama (Pastor, Pendeta, Ustaz) di Mappi memanfaatkan institusi keagamaan tradisional, seperti sekolah minggu atau kegiatan pemuda gereja/masjid, sebagai ruang kelas alternatif konvensional. Mereka menggunakan pendekatan kultural berbasis kearifan lokal (*local wisdom*) yang jauh lebih adaptif, membumi, dan berkesinambungan dibandingkan memaksakan digitalisasi yang belum ditopang kesiapan infrastruktur wilayah rawa.

Akhirnya, perbedaan signifikan ditemukan ketika membandingkan hasil penelitian ini dengan Penelitian C (*Mimin, 2021*) yang membedah *"Strategi Meningkatkan Akses dan Mutu Pendidikan di Kabupaten Pegunungan Bintang Provinsi Papua"*. Penelitian C merekomendasikan bahwa penguatan akses pendidikan harus bertumpu pada peningkatan kapasitas birokrasi kedinasan, penegakan hukum bagi guru yang mangkir tugas, dan tata kelola administrasi pemerintahan daerah yang formal.

Meskipun penelitian ini sepakat bahwa kinerja birokrasi penting, temuan di Kabupaten Mappi mengindikasikan adanya kelemahan akut pada sistem pengawasan dan evaluasi internal Dinas Pendidikan lokal, sehingga penegakan aturan formal sering kali tidak berjalan di lapangan. Kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini adalah penemuan bahwa legitimasi emosional-kultural yang dimiliki oleh tokoh adat dan agama memiliki daya ikat hukum adat (*social sanction*) yang jauh lebih ditakuti dan dipatuhi oleh masyarakat maupun tenaga pendidik setempat dibandingkan sanksi administratif birokrasi.

Ketika kepala dinas atau pengawas sekolah kesulitan memantau kehadiran guru atau membujuk orang tua di kampung rawa yang terisolasi, tokoh adat setempat mampu menggerakkan sanksi sosial dan moral. Peran ini menempatkan tokoh non-formal bukan lagi sekadar elemen "pendukung" seperti yang diasumsikan dalam Penelitian C, melainkan sebagai aktor penggerak utama (*primary driver*) dalam rantai kebijakan tata kelola pendidikan di level akar rumput Kabupaten Mappi.

3.3 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan bahwa salah satu faktor pendukung utama peningkatan akses pendidikan di Kabupaten Mappi adalah tingginya kepercayaan masyarakat terhadap tokoh adat dan tokoh agama, sehingga mereka mampu berperan efektif sebagai mediator, motivator, dan fasilitator dalam mendorong anak untuk tetap bersekolah. Di sisi lain, penelitian juga mengungkap beberapa faktor penghambat, yaitu kondisi geografis Kabupaten Mappi yang didominasi rawa dan hutan lebat, adanya tradisi lokal yang terkadang lebih memprioritaskan aktivitas adat dibanding pendidikan formal, serta keterbatasan anggaran dan sarana pendukung bagi tokoh adat dan tokoh agama dalam menjalankan perannya secara berkelanjutan. Temuan menarik lainnya menunjukkan bahwa meskipun partisipasi kedua tokoh tersebut cukup kuat pada tahap pelaksanaan program, keterlibatan mereka dalam proses evaluasi masih belum optimal karena belum tersedianya forum formal yang secara rutin menampung masukan dan pengawasan dari masyarakat.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa partisipasi tokoh adat dan tokoh agama dalam mendukung peningkatan akses pendidikan bagi anak usia sekolah di Kabupaten Mappi telah terlaksana pada dimensi pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi, dengan peran paling kuat pada dimensi pelaksanaan sebagai mediator, motivator, dan fasilitator dalam mendorong masyarakat menyekolahkan anak. Namun, keterlibatan tersebut belum optimal karena belum terintegrasi secara menyeluruh dalam siklus kebijakan pendidikan, terutama pada dimensi evaluasi yang masih lemah akibat belum adanya wadah formal untuk menyalurkan masukan secara sistematis, sehingga partisipasi tokoh adat dan tokoh agama dalam peningkatan akses pendidikan masih memerlukan penguatan kelembagaan dan koordinasi.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup lokasi yang hanya dilakukan di Kabupaten Mappi sebagai daerah studi kasus. Selain itu, penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan informan yang terbatas pada tokoh adat, tokoh agama, pemerintah daerah, dan perwakilan masyarakat sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan untuk seluruh wilayah Papua Selatan. Penelitian juga berfokus pada kondisi pendidikan Kabupaten Mappi periode 2023–2024.

Arah Masa Depan Penelitian (*Future Work*). Peneliti menyarankan agar penelitian selanjutnya dilakukan pada wilayah 3T lainnya atau beberapa kabupaten di Papua Selatan untuk memperoleh perbandingan yang lebih luas. Penelitian berikutnya juga dapat mengkaji efektivitas forum kolaborasi antara Dinas Pendidikan, tokoh adat, dan tokoh agama serta mengevaluasi dampak pendekatan berbasis kearifan lokal terhadap peningkatan akses pendidikan dan penurunan angka putus sekolah.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Mappi, khususnya Dinas Pendidikan Kabupaten Mappi, para tokoh adat, tokoh agama, serta seluruh informan dan pihak terkait yang telah memberikan izin, dukungan, bantuan, dan informasi selama pelaksanaan penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu sehingga penelitian dapat terselesaikan dengan baik

VI. DAFTAR PUSTAKA

Colclough, C., Rose, P., & Tembon, M. (2000). Gender inequalities in primary schooling: The roles of poverty and adverse cultural practice. *International Journal of Educational Development*, 20(1), 5-27. https://doi.org/10.1016/S0738-0593(99)00046-2

Epstein, J. L. (2018). School, family, and community partnerships in teachers' professional work. *Journal of Education for Teaching*, 44(3), 397-406. https://doi.org/10.1080/02607476.2018.1465669

Faruqi Tutukansa, F., & Tuffahati, D. (2022). Optimalisasi Peningkatan Kualitas Mutu Pendidikan Provinsi Papua sebagai Daerah 3T di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(2), 115-129. https://doi.org/10.31289/jap.v14i2.6987

Huisman, J., & Smits, J. (2009). Effects of household and district-level factors on primary school enrollment in 30 developing countries. *World Development*, 37(1), 179-193. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2008.01.007

Lewin, K. M. (2009). Access to education in sub-Saharan Africa: Patterns, problems and possibilities. *Comparative Education*, 45(2), 151-174. https://doi.org/10.1080/03050060902920518

Mahadiansar, M. (2021). Strategi Partisipatif Pembangunan Sosial di Pulau Penyengat. *Civitas Consecratio: Journal of Governance and Politics*, 1(2), 115-128. https://ejournal.ipdn.ac.id/cc/article/view/1626

Mulyana, M., & Tambunan, C. J. (2021). Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Merauke. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 11(2), 185-198. https://ejournal.ipdn.ac.id/JIWBP/article/view/2259

Pascasarjana, F., & Hasanuddin, M. (2015). Pendidikan sebagai Fondasi Kemajuan Bangsa. *Jurnal Pendidikan Nasional*, 9(2), 77-89. https://journal.unhas.ac.id/index.php/jpn/article/view/3114

Rosshad, A. (2019). Pembangunan Partisipatif di Kota Banjarmasin (Studi Kesesuaian Rencana Kerja Pembangunan Daerah dengan Hasil Musrenbang Tahun Anggaran 2016 di Kecamatan Banjarmasin Tengah). *Jurnal Pembangunan dan Pemberdayaan Pemerintahan*, 4(2), 85-102. https://ejournal.ipdn.ac.id/JPDPP/article/view/847

Saerang, A. E., Mandang, J. L., & Rumampuk, R. (2023). Pembelajaran Daring Membuka Akses Pendidikan Anak Asli Papua. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 8(1), 45-57. https://jurnaldikbud.kemdikbud.go.id/index.php/jpnk/article/view/4211

Salman, D. (2009). Pembangunan dan Perubahan Sosial. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 3(1), 12-21. https://journal.unhas.ac.id/index.php/jish/article/view/402

Sukmana, E., & Islamy, H. (2019). Peranan Kepala Desa dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa. *Jurnal Pembangunan dan Pemberdayaan Pemerintahan*, 4(2), 103-118. https://ejournal.ipdn.ac.id/JPDPP/article/view/855

Tranggano, M., Effendy, K., Lukman, S., & Tahir, I. (2020). Analisis Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil di Kabupaten Buru Provinsi Maluku. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 12(2), 97-111. https://ejournal.ipdn.ac.id/JAPD/article/view/1362

Tuwor, T., & Sossou, M. A. (2008). Gender discrimination and education in West Africa: Strategies for maintaining girls in school. *International Journal of Inclusive Education*, 12(4), 363-379. https://doi.org/10.1080/13603110601183115